

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Manusia dalam kedudukannya sebagai makhluk sosial senantiasa akan berinteraksi dengan manusia lain dalam upaya mewujudkan kebutuhan hidupnya. Kebutuhan hidup manusia tidak cukup yang bersifat dasar, seperti sandang, pangan, dan papan. Lebih dari itu juga mencakup kebutuhan akan pengakuan eksistensi diri dan penghargaan dari orang lain dalam bentuk pujian, pemberian upah kerja, status sebagai anggota masyarakat, ataupun ikut tergabung menjadi anggota suatu partai politik tertentu.

Setiap warga negara dalam kesehariannya hampir selalu bersentuhan dengan aspek-aspek politik praktis baik dalam kelompok maupun individu. Dalam proses pelaksanaan praktik politik dapat terjadi secara langsung maupun tidak langsung. Cara tidak langsung misalnya sebatas mendengar informasi, atau berita-berita tentang peristiwa politik yang terjadi. Sedangkan secara langsung, misalnya orang tersebut terlibat dalam peristiwa politik tertentu.

Politik adalah aspek dari semua perbuatan yang berkenaan dengan usaha kolektif bagi pemenuhan tujuan-tujuan kolektif (dalam Budiharsono, 2003).

Sederhananya, politik merupakan cara individu dalam mencapai tujuannya yang berkenaan dengan sistem sosial. Oleh karena itu, politik melekat dalam lingkungan hidup manusia baik sadar atau tidak. Dalam bermasyarakat, politik mempengaruhi kehidupan individu maupun kelompok manusia. Di dalam kehidupan politik, seperti halnya dalam wilayah-wilayah kehidupan lain, sosialisasi merupakan suatu kunci bagi perilaku dalam politik. Sosialisasi politik merupakan proses bagaimana memperkenalkan sistem politik pada seseorang dan bagaimana orang tersebut menentukan tanggapan serta reaksi-reaksinya terhadap gejala-gejala politik (Almond dalam Damsar, 2010; 153-154).

Partai politik merupakan ciri utama sistem pemerintahan yang demokratis. Partai politik menurut Sigmund Neuman (dalam Budiarjo, 2008) adalah organisasi dari aktivitas-aktivitas politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintah serta merebut dukungan rakyat melalui persaingan dengan suatu golongan atau golongan lain yang mempunyai pandangan berbeda. Salah satu fungsi dari partai politik adalah pendidikan politik, yang mana memungkinkan untuk dilaksanakan di universitas.

Fakultas hukum Universitas X di kota Bandung memiliki lingkup pembelajaran politik dalam bentuk yang lebih sederhana. Seiring dengan berdirinya Universitas X, fakultas hukum ini menjadi salah satu jurusan pertama yang didirikan pada tahun 1955. Saat ini, fakultas hukum Universitas X program sarjana (S1) terakreditasi A untuk jangka waktu 11 April 2009 – 2014 sesuai dengan surat keputusan 10071/D/T/K-IV/2012 dan menjadi salah satu fakultas terfavorit di universitas tersebut. Fakultas hukum universitas X memiliki visi

menegakkan dan mengembangkan hukum di Indonesia baik dalam tataran nasional maupun regional dan internasional. Misinya meliputi proses pembelajaran dan transfer pengetahuan, pengadaan penelitian, serta kegiatan pengabdian kepada masyarakat. (www.xxx.ac.id).

Fakultas hukum Universitas X Bandung memiliki kekhasan akan fasilitas kemahasiswaan yang ditawarkan. Kelembagaan mahasiswa terdiri dari beberapa badan yang terstruktur dari mulai MPM, LKM, dan himpunan fakultas. Lembaga tertinggi disebut MPM (Majelis Perwakilan Mahasiswa), yang bersifat sebagai penghubung antara mahasiswa dengan rektorat. Kinerjanya antara lain membuat peraturan mengenai hak dan kewajiban mahasiswa. Salah satu dari kewajiban mahasiswa adalah menyelenggarakan pemilu di setiap tahunnya. MPM terdiri atas susunan kepanitiaan yang dipimpin oleh ketua, wakil, dan bidang-bidang di dalamnya yang berfungsi untuk mengawasi jalannya program kemahasiswaan. Kemudian terdapat lembaga di bawah MPM yang disebut sebagai LKM (Lembaga Kepresidenan Mahasiswa). Lembaga ini fungsinya menjalankan dan membuat program tahunan mahasiswa antar fakultas, contohnya makelu (malam kekeluargaan) dan *sport combat*, yakni acara pertandingan olahraga antar fakultas. LKM membawahi Himpunan Kemahasiswaan yang dimana peran setiap fakultas menjadi sangat penting. Himpunan Kemahasiswaan ini berfungsi menjembatani antara mahasiswa dan fakultas. Aspirasi dan kegiatan mahasiswa menjadi salah satu fokus yang terpenting, salah satunya kegiatan pemilihan umum yang diselenggarakan di setiap tahunnya.

Pemilihan umum merupakan agenda himpunan yang di dalamnya terjadi proses kaderisasi, yaitu pergantian pemimpin himpunan. Kegiatan tersebutlah yang menjadi sarana mahasiswa untuk berekspresi dalam menyumbang suara menentukan kandidat dan bersosialisasi lebih sering untuk mendapatkan informasi lebih banyak mengenai kandidat tersebut. Adanya struktur organisasi yang terkait dalam Fakultas Hukum Universitas X menyebabkan munculnya kelompok-kelompok sosial.

Berdasarkan wawancara pada 10 mahasiswa dan 2 dosen Fakultas Hukum Universitas X, didapatkan data mengenai gambaran sejarah kelompok-kelompok sosial terbentuk. Bermula dari kebiasaan dan pola pertemanan yang dibentuk berdasarkan kesamaan bergaul pada tahun 90an, mahasiswa fakultas hukum membentuk semacam liga sepakbola yang dimana tim dibagi berdasarkan asal individu; seperti tim orang Jawa, tim orang Sunda, tim orang Batak, tim orang Ambon, tim orang Jakarta, dan lain-lain. Lama-kelamaan karena kebiasaan cara bergaul dan aturan pertemanan ini yang semakin memperkuat ikatan persaudaraan intra kelompok, pada tahun 1993 keberadaan kelompok ini mulai membentuk komunitas yang kemudian larinya ke ranah politik yang bertujuan untuk menduduki kekuasaan himpunan fakultas hukum itu sendiri. Menduduki himpunan tersebut keuntungannya adalah bisa lebih memiliki kuasa untuk menentukan agenda acara fakultas, selain itu anggota himpunan bisa lebih memiliki nama yang terangkat dan lebih terpandang mahasiswa Fakultas Hukum itu sendiri.

Semenjak ada cetusan mengenai kegiatan politik tersebut, di saat yang sama itulah kelompok yang terdiri dari mahasiswa-mahasiswa asal Bandung tergabung menjadi sebuah kelompok yang lebih besar yang bernama partai biru. Sedangkan kelompok lainnya yang mayoritas anggotanya terdiri dari mahasiswa luar kota Bandung tergabung dalam satu kelompok yang bernama partai merah. Kedua partai ini saling bersaing merebutkan suara yang dimana sejak tahun 2003 partai merah lebih sering memenangkan voting pemilu setiap tahunnya. Menurut data partai merah, sejak tahun 2006-2014 sekarang mayoritas mahasiswa asal Bandung dan bersuku bangsa Sunda sebanyak 62% dan tidak bergerak dari skala itu. Partai biru juga sebelumnya sempat memenangi pemilihan suara dan sempat pada tahun 2005 partai biru berhasil kembali mendapatkan wewenang kekuasaan himpunan.

Partai merah menang mutlak menang penghitungan suara dalam beberapa tahun berturut-turut karena sistem yang diterapkan. Untuk partai merah sendiri, mereka memiliki sistem yang diterapkan bertahun-tahun dan diwariskan ke angkatan yang selanjutnya. Partai merah dikenal dengan sistem sangat kuat yang mengakar selama berpuluh tahun. Sistem tersebut tidak lain adalah kegiatan politik tentang bagaimana pengumpulan massa partai dengan menggunakan cara tertentu, labeling mengenai hal-hal positif yang didapat dari bergabung dengan partai merah, dan membagi anggotanya menjadi beberapa divisi khusus; seperti divisi lapangan, data, tim sukses, kepanitiaan. Mereka menyelenggarakan masa orientasi yang dipersiapkan dalam kurun waktu kurang lebih 1 tahun untuk pengangkatan mahasiswa yang akan diikuti dalam pemilu. Masa orientasi itu

disebut dengan puntenan dalam istilah partai merah. Bagi calon ketua himpunan biasanya memiliki masa orientasi sendiri dimana calon ketua diberi pembekalan belajar sistem politik partai merah secara khusus. Sedangkan dari partai biru, mereka memiliki ciri menonjol dalam hal kekerabatan dan kekompakan kelompok. Mereka tidak memiliki sistem politik yang sekuat partai merah, sosialisasi mereka lebih ditekankan lewat intervensi sosial yang menekankan pada hal-hal positif dari partai biru yang menyebabkan mahasiswa baru tertarik bergabung.

Keanggotaan partai yang terbanyak dapat menduduki kekuasaan himpunan selama masa jabatan 1 tahun dan memiliki wewenang untuk menentukan berapa banyak mahasiswa partai lawan yang diperkenankan ikut masuk dalam anggota himpunan. Partai yang menang suara terbanyak dapat menjalankan agenda acara fakultas selama periode jabatan, seperti menjadi panitia ospek ataupun mengatur kepanitiaan acara lainnya.

Dalam suatu kelompok sosial yang hidup dalam ruang terbatas dengan sumber daya terbatas maka sumber daya tersebut kalau diperoleh dapat menguntungkan kelompok sosial itu sendiri. Dalam konteks ini, sumber daya terbatas yang diperebutkan adalah kekuasaan dalam himpunan, ruang terbatas yang dimaksudkan yaitu fakultas hukum, dan kelompok sosial yang terkait adalah partai merah dan partai biru.

Kedua partai ini masing-masing berusaha mengumpulkan sumber kekuatan yang berupa massa partai. Massa partai selain mementingkan kuantitas

anggota, juga mementingkan kualitas dari anggota itu sendiri. Kualitas dari anggota diharapkan akan memperkuat identitas partai dengan sikap fanatis dari anggotanya. Adapun sanksi apabila mahasiswa tidak tergabung dengan salah satu partai yaitu berupa sanksi sosial, contohnya dikucilkan. Mahasiswa yang tidak tergabung dengan partai akan mengalami kesulitan masalah pergaulan. Ketika jam jeda perkuliahan, terdapat blok-blok setiap partai tempat mahasiswa berkumpul. Mahasiswa partai biru tidak dapat duduk di blok mahasiswa partai merah, begitu pula sebaliknya. Hal ini juga berlaku di luar kampus, mahasiswa yang tidak tergabung dalam salah satu partai tersebut cenderung lebih anti sosial dan dikucilkan. Situasi seperti ini terjadi saat mahasiswa angkatan baru menempuh perkuliahan sampai masa mahasiswa tingkat akhir. Mahasiswa yang sudah dianggap senior dan para alumni sudah tidak terlalu merasakan situasi menegang seperti ini, mereka cenderung lebih fleksibel dalam pergaulan namun tetap lebih memegang identitas partai yang dianutnya. Ikatan relasi intra partai sangat kuat sehingga senior suatu partai tertentu apabila merekrut juniornya dalam konteks pekerjaan akan lebih mendahulukan anggota sesama partainya. Kesulitan dalam menjalin relasi antar mahasiswa dalam fakultas hukum tersebut beberapa berdampak sampai mahasiswa lulus dan mencari kerja.

Dalam 5 tahun belakangan ini partai merah terus memenangi pemilu tersebut setiap tahunnya. Pada masa penghitungan anggota kelompok tersebutlah yang biasanya kerap kali menimbulkan keributan. Bahkan terakhir terdapat kasus bahwa terjadi bentrokan senjata antar partai yang sampai melibatkan pihak polisi. Kasus tersebut ditutup dengan pihak fakultas hukum yang ikut turun tangan

menyelesaikan masalah. Meskipun akhirnya tidak berakhir dengan kekerasan, rupanya perang dingin antar partai masih terus terjadi. Situasi ini semakin menegang dan memuncak saat pemilu berlangsung. Bila individu sudah melakukan tindakan fanatis terhadap objek yang dianggap mengganggu, maka terdapat kecenderungan stereotip yang kuat dari satu kelompok terhadap kelompok lainnya (dalam Sarlito, 2007).

Terbentuknya stereotip itu, menurut Feldman (1995, dalam Sarlito, 2007) disebabkan oleh kategorisasi sosial yang merupakan upaya individu untuk memahami lingkungan sosialnya. Kategori sosial ini yang justru mempengaruhi cara pandang individu yang akibatnya akan menimbulkan kesalahan-kesalahan dalam mempersepsi sosial, yang disebut sebagai prasangka. Prasangka menimbulkan stereotip, dan stereotip lah yang memperkuat prasangka (Baron & Byrne dalam Sarlito, 2007). Prasangka yang turun temurun tersebut lambat laun menjadi sangat kuat tertanam dan mampu menyebabkan diskriminasi. Pada akhirnya diskriminasi tersebutlah yang menyebabkan timbulnya pengelompokan. Namun pada saat ini keberadaan partai merah dan biru tersebut lebih fleksibel, dalam arti setiap mahasiswa baru diperkenankan bebas memilih partai mana yang akan ia masuki, tidak terpaku pada asal suku mahasiswa tersebut.

Prasangka menurut Rupert Brown (1994) adalah dipegangnya sikap sosial atau keyakinan kognitif yang bersifat merendahkan, pengekspresian afek negatif, atau tindakan bermusuhan atau diskriminatif terhadap anggota suatu kelompok yang dihubungkan dengan keanggotaannya dalam kelompok tersebut. Krech, Cruthchfield & Ballachey (1986) menjelaskan lebih lanjut bahwa sikap adalah

suatu sistem yang saling berhubungan antara ketiga komponen yang terdiri dari komponen kognitif, afektif, dan konatif. Ketiga komponen tersebut saling bergantung dan saling memengaruhi. Komponen kognitif dari suatu sikap terdiri atas beliefs (meliputi pemahaman, pengetahuan, konsep) individu tentang objek sikapnya. Komponen ini menerangkan tentang pengetahuan mahasiswa mengenai keberadaan partai-partai yang ada di fakultas hukum. Komponen selanjutnya mengacu pada emosi-emosi yang dikaitkan pada suatu objek. Mahasiswa yang memiliki pengetahuan akan partai fakultas secara tidak langsung akan melibatkan perasaan yang mengacu dengan bagaimana ia memandang partai-partai tersebut. Bobot emosional inilah yang memberi karakter mendorong, mendesak, dan memotivasi pada sikap. Komponen kecenderungan bertindak dari suatu sikap meliputi semua kesiagaan berperilaku terhadap objek. Bila individu mempunyai sikap yang positif terhadap objek tertentu, ia cenderung menerima, menolong, dan mendukung. Sebaliknya apabila ia mempunyai sikap yang negatif terhadap objek itu, ia cenderung berperilaku menolak, merusak, menghukum, atau menghancurkan. Ditambahkan, prasangka menurut Allport (1964) dibedakan menjadi 5 derajat kecenderungan tindakan, antara lain antikolusi atau saling membicarakan, menghindar, diskriminasi, penyerangan fisik, sampai eksterminasi atau pembunuhan dan pemusnahan. Derajat prasangka yang rendah, pada umumnya menunjukkan kecenderungan (dibuat dinamika) untuk melakukan antikolusi sampai menghindar, sedangkan derajat prasangka yang lebih tinggi berkecenderungan melakukan diskriminasi, penyerangan fisik, dan pembunuhan.

Deajat tindakan tersebut sangat tergantung pada aktivitas yang berkembang dalam suatu fenomena yang terkait.

Survey awal menjaring pandangan setiap partai akan keberadaan dari partai-partai tersebut pada 25 mahasiswa melalui wawancara singkat, 72% mahasiswa setuju dengan adanya keberadaan partai-partai di area kampus. Sedangkan 28% sisanya tidak setuju adanya partai politik di area kampus, sebab 76% diantaranya mengakui adanya dampak pengotak-kotakan dan diskriminasi yang ditimbulkan dari adanya partai. Peneliti melakukan survei awal lebih lanjut pada mengenai pandangan antar partai yang dilakukan pada 50 orang, yang meliputi 25 mahasiswa partai biru dan 25 mahasiswa partai merah melalui kuesioner dan wawancara singkat. Sebanyak 16 mahasiswa partai merah (64%) memiliki sepenuhnya pandangan negatif pada partai biru. Sedangkan 3 mahasiswa partai merah sisanya (12%) memiliki sepenuhnya pandangan positif pada partai biru. Selain itu terdapat mahasiswa partai merah yang memiliki pandangan positif serta negatif pada partai biru sebanyak 6 orang (24%). Dalam hal ini mahasiswa yang memiliki pandangan positif dan negatif ini memandang partai lawan sebagai rival yang memiliki keunggulan dan juga kelemahan. Sementara itu, sebanyak 16 mahasiswa dari partai biru (64%) sepenuhnya memiliki pandangan negatif pada partai merah. Sedangkan 3 mahasiswa (12%) lainnya sepenuhnya memiliki pandangan positif pada partai merah. Terdapat 1 mahasiswa (4%) yang berpandangan positif serta negatif pada partai merah, yang dimana ia mengakui kelebihan serta kekurangan yang dimiliki partai merah. Kemudian terdapat 5 mahasiswa lainnya (20%) berpandangan netral terhadap partai merah yang berarti

mereka sepenuhnya setuju apabila keberadaan partai dihapus karena dianggap mengganggu.

Sebanyak 40% mahasiswa tidak senang dengan keberadaan partai-partai politik tersebut, dan 60% lainnya merasakan senang dan bangga dengan adanya partai-partai politik tersebut. Kemudian 60% mahasiswa aktif dalam berpartisipasi mencari massa partai dan 40% sisanya memilih untuk tidak aktif dalam kegiatan partai, hanya sebagai partisipan saja.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dilihat bahwa meneliti prasangka menjadi penting agar dapat mengetahui gambaran mengenai derajat tindakan prasangka pada fenomena tersebut. Hal ini penting karena dapat memperkirakan seberapa kuat fenomena diskriminasi antar mahasiswa yang memungkinkan timbulnya perilaku kekerasan. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk mengkaji gambaran prasangka mahasiswa antar kedua partai politik besardalam fakultas hukum Universitas X, yaitu merah dan biru.

1.2 Identifikasi Masalah

Dari penelitian ini ingin diketahui bagaimana prasangka partai merah dan partai biru mahasiswa hukum Universitas X di Kota Bandung.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud

Untuk memperoleh gambaran derajat prasangka partai merah dan partai biru mahasiswa hukum Universitas X di Kota Bandung.

1.3.2 Tujuan

Untuk mengetahui gambaran derajat prasangka berdasarkan komponen sikap (kognitif, afektif, konatif) partai merah dan partai biru mahasiswa hukum Universitas X di Kota Bandung.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

1. Memberikan informasi bagi ilmu Psikologi Sosial, khususnya mengenai prasangka pada mahasiswa hukum Universitas X di Kota Bandung.
2. Memberikan informasi bagi peneliti lain yang tertarik untuk meneliti topik yang serupa dan mendorong dikembangkannya penelitian yang berhubungan dengan prasangka.

1.4.2 Kegunaan Praktis

1. Memberikan informasi mengenai gambaran derajat prasangka mahasiswa kepada bidang kemahasiswaan Fakultas Hukum, antara lain MKM atau LKM sehingga Fakultas Hukum Universitas X Bandung dapat menggunakan informasi yang diperoleh, mengambil kebijakan guna meminimalisir prasangka mahasiswa antar partai merah dan partai biru.

2. Memberikan informasi mengenai derajat prasangka kepada mahasiswa partai merah Universitas X Bandung yang dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam upaya menjalin relasi sosial yang lebih baik.
3. Memberikan informasi mengenai derajat prasangka kepada mahasiswa partai biru Universitas X Bandung yang dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam upaya menjalin relasi sosial yang lebih baik.

1.5. Kerangka Pikir

Manusia akan selalu berusaha untuk mencari segala sesuatu yang berkenaan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya termasuk informasi, baik secara langsung maupun tidak. Ketika manusia telah menetapkan suatu tujuan yang memerlukan upaya dari sosial untuk mencapai tujuannya tersebut, ia akan mengerahkan sosialnya untuk bergerak ke arah pemenuhan kebutuhannya. Segala hal yang berkaitan dengan gerakan kolektif merupakan sebuah cara politik (Budiharsono, 2003). Politik bisa lahir dimana saja selama manusia bersentuhan dengan sosial, begitu pula yang terjadi pada mahasiswa Fakultas Hukum Universitas X Bandung.

Dalam rangka mengidentifikasi diri berdasarkan kelompok sosialnya, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas 'X' Bandung membentuk dan tergabung dalam kelompok yang disebut kelompok partai Merah dan Biru. Berkaitan dengan cara pandang individu terhadap kelompok *ingroup* dan *outgroup* partai dapat dikatakan sebagai prasangka. *Ingroup* adalah kelompok yang menjadi bagian dari

individu sedangkan *outgroup* adalah kelompok luar individu. Prasangka merupakan dipegangnya sikap sosial atau keyakinan kognitif yang bersifat merendahkan, pengekspresian afek negatif, atau tindakan bermusuhan atau diskriminatif terhadap anggota suatu kelompok yang dihubungkan dengan keanggotaannya dalam kelompok tersebut (Brown, 1994). Dengan kata lain prasangka memiliki definisi dipegangnya sikap sosial atau keyakinan kognitif oleh mahasiswa Fakultas Hukum Universitas 'X' partai *ingroup* yang sifatnya merendahkan, pengekspresian afek negatif, atau tindakan bermusuhan atau diskriminatif terhadap partai *outgroup*.

Mahasiswa partai merah dan biru fakultas Hukum Universitas 'X' akan memiliki derajat prasangka yang berbeda satu dengan yang lainnya. Hal ini tergantung dari derajat setiap komponen sikap yang terkait. Rupert Brown (1994) mengungkapkan bahwa definisi prasangka adalah sikap sosial yang cenderung bergerak ke arah negatif, yang kemudian oleh Krech (1986) menguraikan lebih lanjut tiga komponen sikap yaitu kognitif, afektif, dan konatif. Komponen kognitif yang negatif dari suatu sikap terdiri atas beliefs (meliputi pemahaman, pengetahuan, konsep yang bersifat merendahkan) individu tentang objek sikapnya. Pada mahasiswa Fakultas Hukum Universitas X baik partai merah maupun partai biru memiliki sebuah pandangan terhadap partai lawan yang bersifat negatif, seperti cara bergaul yang berbeda, syarat bergabung keanggotaan partai yang tidak sesuai, dan sistem politik yang berbeda serta aturan-aturan yang bersifat menyulitkan.

Komponen kedua adalah afektif. Komponen perasaan mengacu pada emosi-emosi negatif yang dikaitkan pada suatu objek. Suatu objek dirasakan tidak menyenangkan atau tidak disukai. Mahasiswa partai merah dan partai biru memiliki kecenderungan untuk merasa kesal, terganggu, dan tidak nyaman berada di sekitar anggota partai lawan.

Komponen ketiga adalah konatif yaitu kecenderungan berperilaku. Komponen kecenderungan bertindak dari suatu sikap meliputi semua kesiagaan berperilaku terhadap objek. Individu yang mempunyai kecenderungan berperilaku negatif terhadap, ia cenderung berperilaku menolak, merusak, menghukum, atau menghancurkan objek tersebut. Mahasiswa partai biru dan partai merah memiliki kecenderungan untuk menghindari bahkan melakukan penyerangan fisik pada partai lawan apabila derajat prasangka yang dimiliki mahasiswa tinggi.

Ketiga komponen sikap yang meliputi kognitif, afektif, dan konatif tersebut saling bergantung dan saling memengaruhi. Kognisi individu tentang suatu objek dipengaruhi oleh perasaan-perasaan dan kecenderungan bertindak terhadap objek tersebut; perubahan dalam kognisinya tentang objek tersebut cenderung akan menghasilkan perubahan-perubahan dalam segi perasaan dan kecenderungan bertindak terhadap objek tersebut. Seiring dengan perkembangan kognitif individu, perasaan dan kecenderungan bertindak terhadap berbagai objek di lingkungannya terorganisasi menjadi suatu sistem yang relatif menetap, yang disebut sikap. Jadi apabila mahasiswa Fakultas Hukum Universitas 'X' partai *ingroup* memiliki kognitif yang positif terhadap partai *outgroup* maka cenderung akan memiliki afektif serta konatif yang positif pula.

Namun apabila mahasiswa Fakultas Hukum Universitas 'X' memiliki kognitif yang negatif terhadap partai *outgroup* maka cenderung akan memiliki afektif serta konatif yang juga negatif. Dalam fenomena ini, prasangka tidak terkait dengan hasil yang positif atau negatif lagi melainkan tinggi rendahnya sikap negatif yang dimiliki mahasiswa itu sendiri.

Perolehan profil derajat yang berbeda pada pembentukan prasangka dipengaruhi dalam tingkatan sosial dan individu. Faktor dalam tingkatan sosial dalam lingkungan Fakultas Hukum Universitas 'X' meliputi konflik kepentingan, identitas sosial, dan deprivasi relatif. Dalam konflik kepentingan terdapat hubungan yang kompatibel dengan kepentingan kelompok (Campbell 1965 dalam Brown). Dalam fenomena ini, mahasiswa dalam partai yang memiliki kepentingan yang sesuai dengan kelompoknya akan mengusahakan partainya untuk menang dengan cara mengumpulkan massa sebanyak-banyaknya untuk mengalahkan partai lawan.

Faktor identitas sosial, Tajfel dan Turner (dalam Brown, 1994) mengasumsikan lebih jauh bahwa orang secara umum lebih suka memandang dirinya sendiri secara positif daripada negatif. Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas X yang memandang citra diri lebih positif akan menganggap dirinya sebagai bagian dalam sebuah kelompok sehingga ia mampu menyatakan dirinya sebagai keanggotaan partai merah ataupun partai biru.

Dalam faktor deprivasi relatif, penekanannya adalah pengalaman langsung individu bahwa apa yang individu nikmati berhubungan dengan apa yang

harapkan. Tetapi ada deprivasi lain yang berasal dari persepsi orang mengenai peruntungan kelompoknya yang dikaitkan dengan harapan orang itu terhadapnya. Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas X akan memiliki sebuah kepuasan pribadi yang pemenuhannya didapat ketika mereka tergabung dengan salah satu partai tersebut. Kepuasan tersebut akan didapat ketika mahasiswa merasa bahwa kelompok memberikan pemenuhan kebutuhan pribadi seperti dukungan sosial atau keterikatan antar anggota kelompok.

Faktor dalam tingkatan individu dalam diri mahasiswa Fakultas Hukum Universitas 'X' meliputi kepribadian otoritarian, kategorisasi, dan stereotip. Menurut Adorno (1950), orang-orang yang berprasangka adalah mereka yang memiliki agresi yang dialihkan karena takut akan akibat yang timbul bila melampiaskan secara langsung kepada figur otoritas dan mengalihkannya pada target pengganti yang bersifat lebih inferior. Pada mahasiswa Fakultas Hukum Universitas 'X' yang memiliki kepribadian seperti ini, agresi yang dimiliki tersebut dialihkan pada target pengganti yaitu partai lawan yang dipandang lebih inferior dibanding diri maupun kelompoknya.

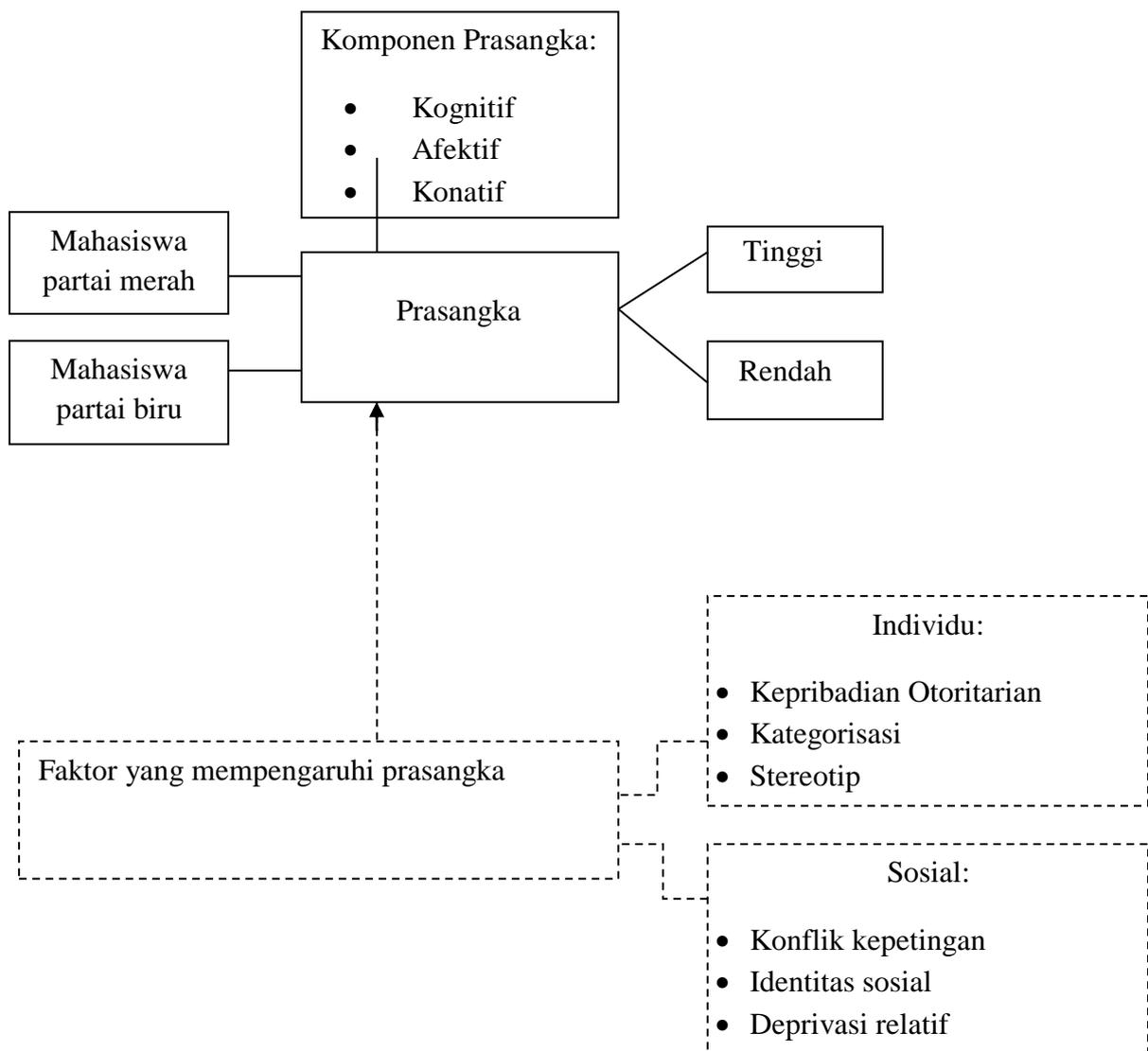
Faktor kategorisasi juga mempengaruhi dalam pembentukan prasangka. Menurut Allport (1954) & Tajfel (1969), tanpa proses kategorisasi maka prasangka tidak mungkin ada. Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas 'X' yang melakukan kategorisasi akan memaknai kesamaan dirinya dengan atribut partainya, antara lain latar belakang suku, kesamaan cara bergaul, serta kebiasaan berperilaku yang serupa.

Stereotip merupakan keyakinan-keyakinan berupa representasi atau peta yang kemudian menjadi acuan bagi individu dalam memproses berbagai informasi yang baru diterima (Lippman dalam Cahyariani, 2005). Seperti yang dikatakan Lepore dan Brown (1994), stereotip tidak secara langsung menunjuk sesuatu yang negatif tentang suatu objek, tetapi lebih merupakan suatu keyakinan mengenai suatu objek cenderung tidak akurat. Pandangan mahasiswa terhadap keberadaan partai lawan yang merujuk pada penilaian sesaat mengenai hal-hal negatif merupakan sebuah stereotip.

Prasangka yang rendah menurut Allport (1954) adalah antikolusi, dimana mahasiswa cenderung akan melakukan perilaku membicarakan kelompok atau anggota kelompok partai *outgroup*. Kemudian biasanya apabila prasangka mengenai kelompok partai *outgroup* tersebut telah sering dibicarakan maka derajat mahasiswa akan cenderung berupaya untuk berperilaku menghindar. Derajat tindakan yang berikutnya mengarah pada prasangka yang tinggi yaitu kecenderungan mahasiswa untuk berperilaku asimetri atau membedakan secara tidak adil. Kemudian apabila mahasiswa dihadapkan dalam suatu kondisi emosi yang sangat tinggi; yang mengarah pada kebencian, akan memungkinkan berperilaku menyerang secara fisik. Derajat tindakan prasangka yang paling tinggi mengarah pada eksterminasi yaitu dimana mahasiswa cenderung melakukan tindakan irrasional seperti pembunuhan dan pemusnahan secara besar-besaran terhadap partai lawan.

Berdasarkan penjelasan di atas maka perolehan derajat tindakan prasangka mahasiswa Fakultas Hukum Universitas “X” selain didapatkan dari ketiga komponen utama, juga dipengaruhi oleh faktor sosial dan individu.

Secara singkat uraian di atas digambarkan melalui kerangka pikir sebagai berikut:



1.5 Bagan Kerangka Pikir

1.6 Asumsi Penelitian

- Mahasiswa partai merah dan mahasiswa partai biru memiliki gambaran derajat prasangka yang berbeda-beda.
- Derajat prasangka setiap mahasiswa dibentuk oleh konsistensi komponen kognitif, afektif dan konatif yang terkait.
- Mahasiswa partai biru memiliki derajat prasangka yang lebih tinggi pada partai merah karena di fenomena tersebut anggota partai biru seringkali memulai melakukan tindak kekerasan.

1.7 Hipotesis Penelitian

- Terdapat perbedaan prasangka yang signifikan antara mahasiswa partai merah dan partai biru fakultas Hukum Universitas X Bandung